

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018

LAPORAN KINERJA
LKJ
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2017.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sinjai Tahun 2017 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kedua dalam masa RENSTRA Tahun 2013-2018. LKj Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013.-2018).

LKj Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sinjai disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sinjai Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai pada tahun 2017, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 2 (*dua*) indikator kinerja utama, telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa kegiatan pendukung yang indikatornya belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan

perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat **kendali** untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses **evaluasi** menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, tentunya berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai yakni membantu Bupati dalam Menyelenggarakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pendidikan, maka pada proses perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak atau *stakeholders*, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program-program yang dirumuskan dan pemanfaatan hasil-hasilnya, melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih bersifat partisipatif.

Bersifat partisipatif dimaksudkan untuk mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat (keterlibatan semua pihak) tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan.

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dimaksudkan untuk mendorong semua lapisan masyarakat yang terkait dengan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sebagai konseptor, pengambil kebijakan, pelaksana. untuk lebih eksis meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan. Peningkatan kualitas dan peran serta pada semua aspek kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung dilakukan melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai motivator dan akselerasi proses pembangunan.

Dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 dimaksudkan mencari pemecahan solusi antisipatif terhadap kebutuhan daerah untuk masa 5 tahun mendatang. Dan pada dasarnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini disusun sebagai acuan penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD, dan juga merupakan upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya lainnya (swasta) untuk

terlibat di dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang ada dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan.

Dalam kaitan tersebut di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai perlu memperhatikan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan prinsip *good governance* yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan. Prinsip *good governance* ini telah menjadi nilai-nilai universal dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018.

Dengan demikian, kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai di masa datang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai *good governance* secara nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

1.4. ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai yang dituangkan dalam Renja tahun 2017 adalah :

1. Peningkatan layanan akses dan kualitas pendidikan. telah dilakukan usaha perluasan dan perbaikan melalui kebijakan pendidikan gratis yang diimplementasikan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi akselerasi kinerja yang menyamai kinerja nasional
2. porsi penduduk dengan kualifikasi luaran pendidikan tinggi baru sekitar 1,3%, masih jauh dari kondisi ideal. Kualitas lulusan SD hingga SLTA sudah mengalami peningkatan dilihat dari tingkat kelulusan ujian nasional, namun demikian perlu diperhatikan keberlanjutan prestasi tersebut khususnya terkait dengan kinerja guru yang telah tersertifikasi
3. Masih terbatasnya penyediaan berbagai pendidikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan baik formal dan non formal
4. Belum sempurnanya kurikulum dan sistem pembelajaran
5. Belum maksimalnya penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan
6. Belum efektifnya dan efisiensi proses belajar mengajar pada satuan pendidikan
7. Masih lemahnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja sekolah
8. Masih terbatasnya pengembangan sekolah dan kelas unggulan / sekolah unggulan
9. Belum terlaksananya pendidikan berbasis masyarakat dan berorientasi pada keterampilan hidup
10. Belum maksimalnya penyelenggaraan kegiatan kelompok musyawarah tenaga pendidik pada setiap gugus satuan pendidikan
11. Belum maksimalnya pelaksanaan akreditasi sekolah
12. Belum semuanya tenaga pendidik dan kependidikan mendapatkan insentif subsidi maupun reward bagi PTK yang berkinerja baik
13. Belum maksimalnya pemberdayaan personil dan lembaga pendidikan
14. Belum maksimalnya pelaksanaan supervisi pendidikan

1.5. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57 tahun 2016.

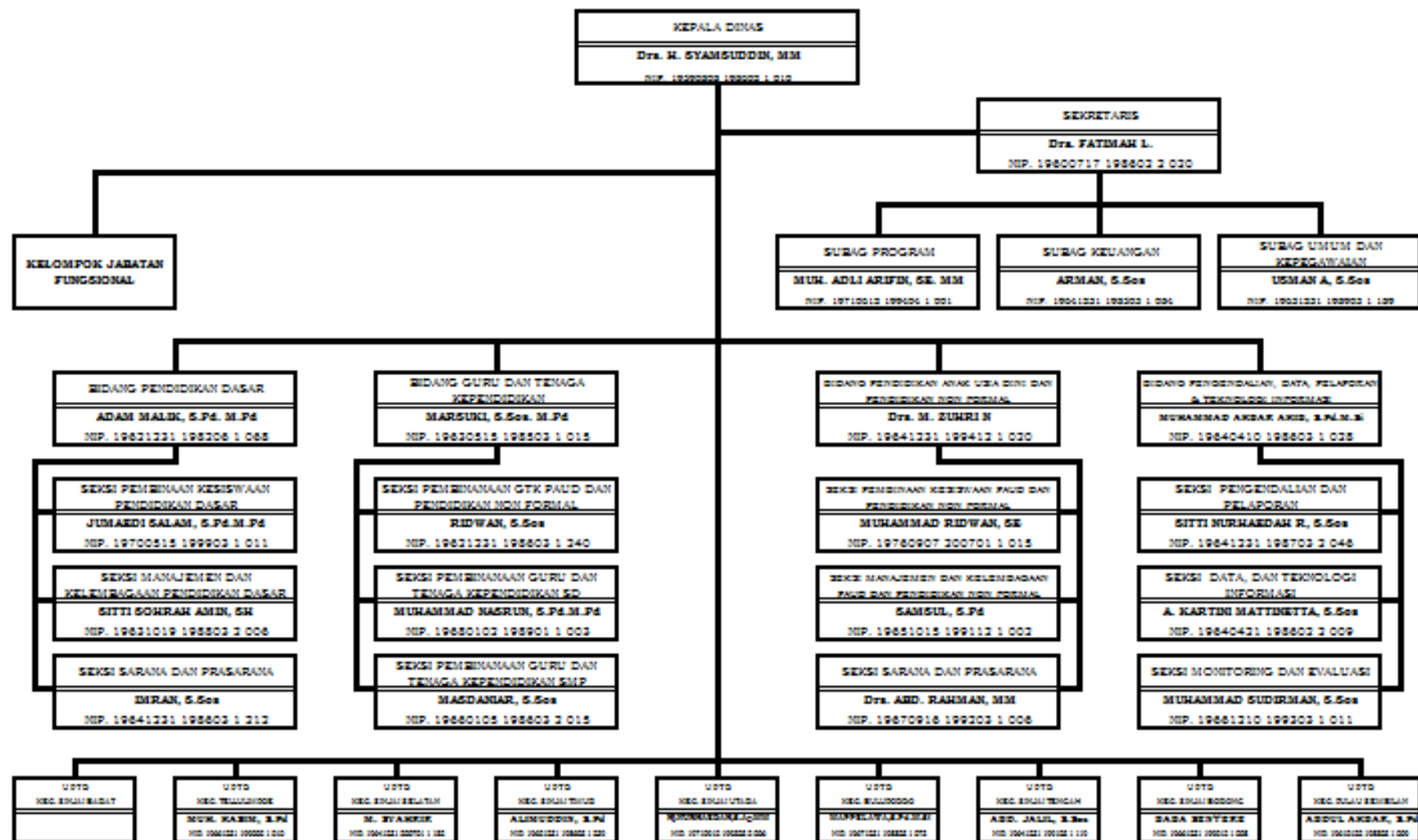
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh satu Sekretariat yang menangani Administrasi dan empat Bidang yang melaksanakan teknis pendidikan, dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan dinas yang meliputi:
 - a. Penyusunan Program dan Laporan Kinerja
 - b. Pengelolaan Administrasi Keuangan
 - c. Penatausahaan, Pengelolaan Administrasi Barang, Urusan Rumah Tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan dinas
2. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan sebagian tugas dinas yang meliputi pembinaan kesiswaan, manajemen dan kelembagaan dan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang pembinaan kesiswaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
 - b. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang manajemen dan kelembagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
 - c. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
3. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan sebagian tugas dinas yang meliputi pembinaan kesiswaan, manajemen dan kelembagaan dan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang pembinaan kesiswaan pendidikan dasar
 - b. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang manajemen dan kelembagaan pendidikan dasar
 - c. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang manajemen dan kelembagaan pendidikan dasar
4. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan sebagian tugas dinas meliputi pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal

- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar
 - c. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama
5. Bidang Pengendalian, Data, Pelaporan dan TI mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan sebagian tugas dinas meliputi pengendalian, data, pelaporan dan teknologi informasi yang meliputi:
- a. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan dibidang pengendalian dan pelaporan
 - b. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang data dan teknologi informasi
 - c. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan dibidang monitoring dan evaluasi

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI



1.6. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya dan sarana prasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai sampai dengan Desember 2017, memiliki Pegawai sebanyak 2685 orang Pegawai Negeri Sipil terdiri dari pejabat Struktural yaitu 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 5 orang Kepala Bidang, 15 orang Kepala Sub Bagian/Seksi dan jumlah staf 204 orang dan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas 9 Orang, dan Tenaga Fungsional (Pengawas Sekolah dan Guru) sebanyak 2451 orang.

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Dari 2685 orang pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai terbagi atas 1009 laki-laki dan 1676 perempuan dengan rincian sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini:

Gambar 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Gender

NO	JABATAN		JENIS KELAMIN		JUMLAH
			L	P	
I	STRUKTURAL				
	1	KABUPATEN			0
		- ESELON II	1	0	1
		- ESELON III	4	1	5
		- ESELON IV	10	5	15
	2	UPTD KECAMATAN	7	1	8
	3	UPTD SKB	1	0	1
		Sub Total I	23	7	30
II	STAF				
	1	KABUPATEN	14	20	34
	2	UPTD KECAMATAN	9	7	16
	3	UPTD SKB	0	0	0
	4	BUJANG	54	0	54
		- ADMINISTRASI SMP	36	27	63
		- ADMINISTRASI SD	18	19	37
		Sub Total II	131	73	204
III	FUNGSIONAL				
	1	PENGAWAS	27	8	35
	2	PENILIK	0	0	0
	3	PAMONG	6	1	7
	4	GURU TK	0	121	121
	5	GURU SD/MI	564	1143	1707
	6	GURU SMP	243	302	545
	7	GURU MTs	0	2	2
	8	GURU SMP SATAP	15	19	34
		Sub Total III	855	1596	2451
		Total	1009	1676	2685

Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan terdiri atas 0 orang lulusan SMP, 4 Orang lulusan SMA, 0 orang lulusan D1, 102 orang lulusan D2, 0 orang lulusan D3, 2531 orang lulusan S1 dan 48 orang lulusan S2 dengan rincian sebagai berikut:

- SD : 0 Orang
- SMP : 0 Orang
- SMA : 4 Orang
- D1 : 0 Orang
- D II : 102 Orang
- D III : 0 Orang
- S1 : 2531 Orang
- S 2 : 48 Orang

1.7. INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Pendidikan. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah inovasi Pemetaan Pendidikan dengan pembangunan sebuah aplikasi yang disebut PETIK guna memudahkan pencarian lokasi dan titik koordinat sekolah yang dapat diakses melalui jaringan internet.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

VISI DAN MISI

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Pendidikan yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

VISI :

Berlandaskan hasil rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sinjai yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergitas dengan Renstra SKPD.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan pendidikan.

Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai harus menetapkan kebijakan dan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi pendidikan untuk membentuk manusia seutuhnya secara proporsional dan bertanggungjawab, dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi dan peran kontrol, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan serta menekan dan semaksimal mungkin menghilangkan ketidakpedulian terhadap pendidikan.

Secara konseptual Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai senantiasa bermuara kepada ketercapaian mencerdaskan Sumber Daya manusia seutuhnya dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara dan sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Yakni “ **Terwujudnya Sinjai Bersatu yang Sejahtera, Unggul dalam Kualitas Hidup , Terdepan dalam Pelayanann Publik** “, maka ditetapkan Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai 2013-2018, yakni :

**“ TERWUJUDNYA LAYANAN PENDIDIKAN YANG TERDEPAN,
BERKUALITAS, BERKARAKTER, TERJANGKAU DILANDASI IMAN DAN
TAQWA ”**

Dari visi diatas dapat dijelaskan, yaitu : (1) Terwujudnya layanan Pendidikan Yang Terdepan dimaksudkan adalah masyarakat Sinjai mendapatkan jaminan pelayanan pendidikan yang prima, cepat, tepat, mudah dan terbaik (2) Berkualitas dimaksudkan adalah seluruh proses pembangunan pendidikan sebagai suatu sistem, konsisten terhadap

peningkatan kualitas disemua sektor kehidupan (3) Berkarakter berarti masyarakat Sinjai memiliki kemampuan dan kematangan baik secara intelektual, spritual maupun emosional dalam membangun hubungan antar pribadi, kelompok serta mengamalkan nilai-nilai keagamaan, berakhlakul karimah serta senantiasa menjaga keutuhan, kebersamaan dan kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap merujuk kepada kearifan lokal Kabupaten Sinjai. (4) Terjangkau dimaksudkan masyarakat Sinjai memperoleh akses layanan pendidikan dengan mudah, cepat , terjangkau dan memperkecil resiko yang memungkinkan terjadi. (5) dilandasi Iman dan Taqwa dimaksudkan bahwa sebagai ummat yang beragama semua langkah dan usaha yang dilakukan harus berlandaskan ajaran agama yang kita anut masing-masing, oleh karena yang paling tinggi derajatnya di hadapan sang pencipta adalah orang-orang yang tinggi nilai Iman dan Ketaqwaanya.

MISI:

Untuk mewujudkan visi organisasi tersebut di atas adalah memberikan kontribusi nyata yang strategis dan inovatif dalam pengembangan Pendidikan di Kabupaten Sinjai, melalui :

1. Mewujudkan Pemerataan akses pendidikan, Peningkatan Kualitas dan Relevansi serta Manajemen Tata Kelola Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Non Formai dan Informal dan Pendidikan Kesetaraan

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk merealisasikan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai, diperlukan rumusan tujuan dan sasaran yang lebih jelas agar dapat menggambarkan ukuran – ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Rumusan tersebut merupakan arah bagi sikap dan perilaku seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam mewujudkan nilai – nilai, amanah, profesional, kreatif, bertanggungjawab, disiplin, demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu dalam periode tahun 2013 – 2018, Dinas Pendidikan Pemda dan Olahraga menetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah dirumuskan pada Tabel I di bawah ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1. Angka Melek Huruf 2. Angka Partisipasi Kasar PAUD 3. Angka Partisipasi Kasar SD 4. Angka Partisipasi Kasar SMP 5. Angka Partisipasi Murni SD 6. Angka Partisipasi Murni SMP
		Meningkatnya Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal	1. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik 2. Jumlah Siswa dan Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu 3. Angka Kelulusan Peserta Didik 4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan
		Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik yang berkarakter	1. Prosentase kedidiplinan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik

Dari uraian Tabel 1 diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai menetapkan 1 tujuan strategis dengan 3 sasaran strategis. Penjabaran waktu (miles stone) untuk target pencapaian indikator dari 3 sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Tabel II di bawah ini :

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2013	Target Kinerja Pada Tahun Ke				
						2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1. Angka Melek Huruf	Persen	99,05	99,44	100	100	100	100
			2. Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	61,67	63,19	66,19	69,19	72,19	72,50
			3. Angka Partisipasi Kasar SD	Persen	105,98	101,25	101,30	101,40	101,45	101,50
			4. Angka Partisipasi Kasar SMP	Persen	116,51	109,12	99,20	99,30	99,35	99,40
			5. Angka Partisipasi Murni SD	Persen	98,47	98,56	88,40	88,50	88,55	88,60
			6. Angka Partisipasi Murni SMP	Persen	85,72	95,93	79,80	79,90	79,95	80,00
		Meningkatnya Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal	1. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik	Tenaga Pendidik	2226	2150	2100	2050	2000	1900
			2. Jumlah Siswa dan Mahasiswa yang	Siswa	0	162	162	162	162	162
				Mahasiswa	0	300	300	300	300	300

			mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu	Persen	99,29	98,70	98,80	98,90	99,00	99,10
			3. Angka Kelulusan Peserta Didik							
			4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah Lembaga Sekolah	66,29	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00
		Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik yang berkarakter	1. Prosentase kedisiplinan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik	Siswa	0	50	40	30	20	10
				Pendidik	0	50	40	30	20	10
				Tenaga Kependidikan	0	50	40	30	20	10

Pencapaian sasaran strategis pada tabel di atas, diukur melalui indikator dimana indikator tersebut merupakan penetapan Indikator Kiner Utama (IKU) yang menyusunnya mengacu kepada kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta struktur eselonisasi yang dimiliki. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis seperti yang diuraikan pada tabel di atas, dan IKU tersebut mengacu pada RPJMD dan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2013-2018.

Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2017 sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Pendidikan Dasar
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
7. Program Pembebasan Biaya Sekolah

Tabel 2.3

Program untuk pencapaian sasaran tahun 2017

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	998.060.400	979.620.400
2.	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	9.025.460.530	9.540.980.530
3.	Pendidikan Menengah	22.864.900	22.864.900
4.	Pendidikan Non Formal	87.979.300	87.979.300
5.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	198.148.680	198.148.680
6.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	562.778.300	546.098.300
7.	Pembebasan Biaya Sekolah	6.897.352.000	7.423.352.000
8.	Bantuan Operasional Sekolah	0	32.722.800.000
TOTAL		17.704.664.810	51.521.844.110
		Penambahan	33.817.179.300
		% Kenaikan	191%

6.2 Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta rencana capaian indikator kinerja yang dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja PD. Penyusunan rencana kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen PD untuk mencapainya dalam tahun anggaran berjalan (Tahun 2017). Dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 ini, memuat informasi tentang (a) sasaran strategis (b) indikator kinerja dan (c) target kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2017. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Kelembagaan No: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Peraturan Menteri dalam Negeri No: 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja PD, maka uraian Rencana Kinerja Tahun 2017) Dinas Pendidikan seperti tabel di bawah ini :

Tabel III Penetapan Kinerja Tahun 2016
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2017
1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1. Angka Melek Huruf 2. Angka Partisipasi Kasar PAUD 3. Angka Partisipasi Kasar SD 4. Angka Partisipasi Kasar SMP 5. Angka Partisipasi Murni SD 6. Angka Partisipasi Murni SMP	Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 72,19 101,45 99,35 88,55 79,95
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal	1. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik 2. Jumlah Siswa dan Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu 3. Angka Kelulusan Peserta Didik 4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Tenaga Pendidik Siswa Mahasiswa Persen Jumlah Lembaga Sekolah	2000 162 300 99,00
	Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik yang berkarakter	1. Prosentase kedidiplinan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik	Siswa Pendidik Tenaga Kependidikan	25 5 5

Perjanjian Kinerja

Penetapan / perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden R.I. Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sakip dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang juknis Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2017, Dinas

Pendidikan Kabupaten Sinjai menjadikan perjanjian kinerja ini sebagai dokumen penetapan kinerja. Perjanjian Kinerja ini merupakan komitmen untuk mendukung dan melaksanakan ketercapaian sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam Renstra OPD dan RPJMD 2013 -2018. Oleh karena itu, Penetapan Kinerja OPD Dinas Pendidikan telah diperjanjikan dengan Pemerintah Kabupaten (Bupati) selaku pemberi tugas / amanah dan Dinas Pendidikan (Kadis) selaku pengembang tugas / penanggungjawab kinerja. Disamping itu untuk mencapai strategi organisasi dan meningkatkan kinerja, Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja dengan Sekretaris dan Kepala Bidang sebagai bagian pendukung kontrak kinerja dengan Bupati merupakan kesepakatan yang berisi pernyataan kesanggupan untuk mencapai IKU dengan target yang ditetapkan dalam tahun anggaran bersangkutan. Untuk menunjang ketercapaian kinerja yang telah diperjanjikan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengalokasikan anggaran melalui APBD Pokok tahun 2017 sebesar Rp. **17.704.664.810,-** dengan 7 program. Dalam implementasi pencapaian kinerja ini dengan kebijakan penganggaran melalui APBD-Perubahan, maka alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk menunjang ketercapaian indikator tersebut mengalami perubahan yang semula Rp. **17.704.664.810,-** menjadi Rp. **51.521.844.110,-** atau mengalami kenaikan 191% sebagaimana Keputusan Bupati Sinjai No: 818 Tahun 2017 tertanggal 13 Oktober 2017 tentang Pengasahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2017	Unit Kerja Penanggung jawab
1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1. Angka Melek Huruf 2. Angka Partisipasi Kasar PAUD 3. Angka Partisipasi Kasar SD 4. Angka Partisipasi Kasar SMP 5. Angka Partisipasi Murni SD 6. Angka Partisipasi Murni SMP	Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 72,19 101,45 99,35 88,55 79,95	1. Sekretariat 2. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal 3. Bidang Pendidikan Dasar 4. Bidang Guru Dan Tenaga Kependidikan 5. Bidang Pengendalian, Data, Pelaporan & Teknologi Informasi
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal	1. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik 2. Jumlah Siswa dan Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu 3. Angka Kelulusan Peserta Didik 4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Tenaga Pendidik Siswa Mahasiswa Persen Jumlah Lembaga Sekolah	2000 162 300 99,00	1. Sekretariat 2. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal 3. Bidang Pendidikan Dasar 4. Bidang Guru Dan Tenaga Kependidikan 5. Bidang Pengendalian, Data, Pelaporan & Teknologi Informasi
3	Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik yang berkarakter	1. Prosentase kedidiplinan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik	Siswa Pendidik Tenaga Kependidikan	25 5 5	1. Sekretariat

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	998.060.400
2.	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	9.025.460.530
3.	Pendidikan Menengah	22.864.900
4.	Pendidikan Non Formal	87.979.300
5.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	198.148.680
6.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	562.778.300
7.	Pembebasan Biaya Sekolah	6.897.352.000
8.	Bantuan Operasional Sekolah	0
	TOTAL	17.704.664.810

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5:
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013-2018

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1. Angka Melek Huruf	Persen	$\frac{\text{Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun t}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Data Statistik / Capil
		2. Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	$\frac{\text{Jumlah Peserta Didik (usia 0-6 tahun)}}{\text{Jumlah Penduduk (Usia 0-6 tahun)}} \times 100$	Profil Pendidikan
		3. Angka Partisipasi Kasar SD	Persen	$\frac{\text{Jumlah Peserta Didik}}{\text{Jumlah Penduduk (Usia 7-12 tahun)}} \times 100$	Profil Pendidikan
		4. Angka Partisipasi Kasar SMP	Persen	$\frac{\text{Jumlah Peserta Didik}}{\text{Jumlah Penduduk (Usia 13-15 tahun)}} \times 100$	Profil Pendidikan
		5. Angka Partisipasi Murni SD	Persen	$\frac{\text{Jumlah Peserta Didik (usia 7-12 tahun)}}{\text{Jumlah Penduduk (Usia 7-12 tahun)}} \times 100$	Profil Pendidikan
		6. Angka Partisipasi Murni SMP	Persen	$\frac{\text{Jumlah Peserta Didik (usia 13-15 tahun)}}{\text{Jumlah Penduduk (Usia 13-15 tahun)}} \times 100$	Profil Pendidikan
	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik	Tenaga Pendidik	Jumlah Tenaga Pendidik Yang Belum Menerima Sertifikasi Berdasarkan Syarat Tertentu	Seleksi

Formal dan Non Formal	2. Jumlah Siswa dan Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu	Siswa Mahasiswa	Jumlah Siswa/Mahasiswa yang mendapatkan Biaya Pendidikan berdasarkan syarat tertentu dan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya/Menyelesaikan Program Studi	Seleksi
	3. Angka Kelulusan Peserta Didik	Persen	Jumlah Lulusan pada tingkat satuan SD/MI dan SMP/MTs $\frac{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah Lulusan pada tingkat satuan SD/MI dan SMP/MTs}} \times 100$	Profil Pendidikan
	4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah Lembaga Sekolah	Jumlah sekolah yang sudah mendapat bantuan sarana dan prasarana $\frac{\text{Jumlah Sekolah Keseluruhan}}{\text{Jumlah sekolah yang sudah mendapat bantuan sarana dan prasarana}} \times 100$	Data DAK
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1. Prosentase kedisiplinan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik	Siswa Pendidik Tenaga Kependidikan	Jumlah Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disiplin $\frac{\text{Jumlah Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar}}{\text{Jumlah Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan}} \times 100$	Laporan Sat Pol PP

1.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp **292.103.642.008,70,-** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Rencana Belanja
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
SINJAI TAHUN ANGGARAN 2017

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	271.806.669.374,00	93,05
2	Belanja Langsung	20.296.972.634,70	6,95
Jumlah		292.103.642.008,70	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Alokasi persasaran Tahun Anggaran 2017

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	998.060.400
2.	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	9.025.460.530
3.	Pendidikan Menengah	22.864.900
4.	Pendidikan Non Formal	87.979.300
5.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	198.148.680
6.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	562.778.300
7.	Pembebasan Biaya Sekolah	6.897.352.000
8.	Bantuan Operasional Sekolah	0
	TOTAL	17.704.664.810

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD, diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

3.2. ANALISI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai tahun 2016 dinyatakan “berhasil”, yaitu capaiannya > 100% dari target yang telah ditetapkan. Dari sebanyak 12 indikator kinerja dari 3 sasaran, sebanyak 11 indikator dinyatakan “berhasil” karena capaiannya di atas 100% dari target, 1 indikator dinyatakan tidak berhasil karena capaiannya kurang dari target yang ditetapkan. Indikator yang tidak berhasil adalah presentase angka kelulusan peserta didik. Evaluasi dan analisa capaian kinerja Dinas Pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Pendidikan yang efektif dan efisien tersebut dalam tahun 2017 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan;
2. Meningkatnya mutu pendidikan formal dan informal;
3. Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang berkarakter.

Penjelasan capaian masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Pencapaian sasaran meningkatnya akses layanan pendidikan diukur dari 6 indikator dengan target dan realisasi sebagai berikut:

A. Analisis Capaian Indikator Kinerja

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Sinjai harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan. Untuk mengetahui peningkatan Akses layanan pendidikan, Meningkatnya Mutu Pendidikan Formal dan Informal, Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang berkarakter maka dapat dilihat dari indikator sebagai berikut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	Angka Melek Huruf	Persen	100	100	100
		APK PAUD	Persen	72,19	96,52	133,70
		APK SD	Persen	101,45	113,98	112,35
		APK SMP	Persen	99,35	115,35	116,10
		APM SD	Persen	99,35	100	100,65
		APM SMP	Persen	79,95	100	125,08
Rata-Rata Capaian Kinerja						114,65
2	Meningkatnya mutu pendidikan formal dan informal	kualifikasi pendidikan tenaga pendidik	Tenaga Pendidik	2000	1797	89,85
		Jumlah Siswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu	Siswa	162	141	87,04
		Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu	Mahasiswa	300	681	227,00
		Angka Kelulusan Peserta Didik	Persen	99,00	98,5	99,49
		Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persen	69,69	76,12	109,23

Rata-Rata Capaian Kinerja						122,52
3	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang berkarakter	Presentase Kedisiplinan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik	Guru	5	0	100,00
			Pegawai	5	0	100,00
			Siswa	25	0	100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja						100,00

1. Angka Melek Huruf

Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus

Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pendidikan telah melakukan program penuntasan terhadap data base Penduduk Buta Aksara (By Name By Address) hasil pendataan tenaga lapangan Dikmas Kabupaten Sinjai Tahun 2009 sebanyak 11.787 Orang. Dari data tersebut semuanya telah dituntaskan melalui Program Penuntasan Buta Aksara sejak tahun 2009 sampai tahun 2015 melalui Dana APBD II Kabupaten Sinjai, APBD I Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN hingga tuntas Melek Aksaran sebanyak 11.787 orang. Walau demikian data Buta Aksara Versi BPS sebagai data makro hasil sensus masih tersisa sebanyak 5.272 orang dan akan diadakan penelusuran / pendataan by name by address. Karena telah mencapai target yang ditetapkan maka untuk tahun 2017 sudah tidak ada lagi kegiatan untuk peningkatan Angka Melek Huruf dan yang dilaksanakan adalah kegiatan lanjutan untuk menghindari atau mencegah penduduk yang melek huruf kembali menjadi buta huruf.

2. Angka Partisipasi Kasar PAUD

Pendidikan anak usia dini (PAUD) mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD

Upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menunjukkan peningkatan. Angka partisipasi kasar (APK) pada kelompok usia ini telah meningkat dari target 72,19% pada tahun 2017 menjadi 96,52% atau meningkat sebesar 133,70% pada tahun 2017. Tahun 2017 jumlah Anak Usia Dini yang terdata usia usia 0-6 tahun sebanyak 27.198 anak, yang berusia 4-6 tahun sebanyak 12.755 anak yang berhasil ditampung atau terlayani oleh lembaga PAUD sebanyak 12.290 anak atau 96,52%

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan Presentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (Berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan, yang meliputi:

a. APK SD sederajat

Perhitungan APK SD adalah jumlah siswa yang bersekolah di SD dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun. APK SD untuk tahun 2017 di targetkan 101,45% dan terealisasi 113,98% hal ini disebabkan karena adanya siswa yang belum berumur 7 tahun atau sudah berumur lebih dari 12 tahun sedang bersekolah di Sekolah Dasar. Tahun 2017 jumlah siswa yang bersekolah di SD/MI sederajat sebanyak 31.176 Siswa sedang jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 27.350 siswa sehingga mencapai presentase 113,98%.

b. APK SMP sederajat

Perhitungan APK SMP adalah jumlah siswa yang bersekolah di SMP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun. APK SMP untuk tahun 2017 di targetkan 99,35% dan terealisasi 115,35% hal ini disebabkan karena adanya siswa yang belum berumur 13 tahun atau sudah berumur lebih dari 15 tahun sedang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama. Tahun 2017 jumlah siswa SMP/MTs sederajat yang berhasil ditampung sebanyak 15.199 Siswa(i) sedangkan siswa 12-15 tahun sebanyak 13.176 siswa(i) atau terealisasi 115,35%

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah presentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu maka APM akan mencaai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, meliputi:

a. APM SD

Perhitungan APM SD adalah jumlah siswa usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun. APM SD untuk tahun 2017 di targetkan 99,35% dan terealisasi 100%. Tahun 2017 jumlah siswa yang bersekolah di SD/MI sederajat usia 7-12 tahun sebanyak 27.350 Siswa sedang jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 27.350 siswa sehingga mencapai presentase 100%.

b. APM SMP

Perhitungan APM SMP adalah jumlah siswa usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun. APM

SMP untuk tahun 2017 di targetkan 79,95% dan terealisasi 100. Tahun 2017 jumlah siswa SMP/MTs sederajat usia 13-15 tahun yang berhasil ditampung sebanyak 13.176 Siswa(i) sedangkan siswa 12-15 tahun sebanyak 13.176 siswa(i) atau terealisasi 100%

5. Kualifikasi Pendidikan tenaga pendidik

Menurut Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7, profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut : (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, (3) memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, (5) memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Dalam kenyataannya mutu guru di Indonesia sangat beragam dan rata-rata masih di bawah standar yang telah ditentukan. Banyak guru yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan dan belum mempunyai kompetensi yang telah disyaratkan.

Dalam Undang Undang No. 14/2005 pasal 2, disebutkan bahwa pengakuan guru sebagai tenaga yang profesional dibuktikan dengan sertifikasi pendidik. Selanjutnya pasal 11 menjelaskan bahwa sertifikasi pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

Tujuan sertifikasi adalah untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan; meningkatkan martabat guru; dan meningkatkan profesionalisme guru. Untuk tujuan yang terakhir ini guru dituntut agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Artinya, dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik guru harus dapat memenuhi keinginan/harapan masyarakat dalam hal ini siswa dan orang tua; memiliki landasan pengetahuan yang kuat dan terkini khususnya dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya; dan dalam proses untuk mendapatkan profesionalisme itu hendaknya dilakukan atas dasar kompetensi individu, bukan hasil KKN.

Untuk tahun 2017 ditargetkan sebanyak 2000 guru telah memiliki sertifikat pendidik dan terealisasi sebesar 1797 guru atau hanya mencapai 89,85% dari target yang ditetapkan hal ini disebabkan karena adanya peralihan kewenangan sehingga guru untuk tingkat Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan atau sederajat sudah tidak terdata namun target yang ditetapkan adalah jumlah keseluruhan guru mulai tingkat PAUD sampai SM dan Sederajat..

6. Jumlah siswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu
Pemberian bantuan ini merupakan salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten Sinjai bertujuan untuk memberikan motivasi kepada peserta didik agar dapat berprestasi secara akademik dan agar peserta didik terbantu memenuhi sebagian kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dasar hukum dari program ini adalah Amandemen UUD 1945 pasal 30 ayat (4) “ pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyediakan anggaran pendidikan” dan selanjutnya dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas pasal 11 ayat (1) “ pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.
Dalam tahun 2017 Tabungan Pendidikan diperuntukkan untuk 54 gugus dengan jumlah penerima sebanyak 162 siswa/i berprestasi dan terealisasi sebanyak 141 siswa/i atau sebanyak 47 gugus sehingga mencapai 87,04% hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dimana Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan atau sederajat telah beralih ke Provinsi dan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah.
7. Jumlah mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu
Pemberian Penghargaan Kepada Mahasiswa Berprestasi bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studi akhir, meningkatkan prestasi akademik mahasiswa sinjai serta motivasi berprestasi bagi mahasiswa lain, mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan dan meningkatkan akses keterjangkauan dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi sasaran pemberian bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa berprestasi diberikan kepada mahasiswa sinjai yang akan menyelesaikan studinya dan memiliki prestasi akademik pada setiap Program Studi di Perguruan Tinggi.
Pada tahun 2017 ditargetkan jumlah mahasiswa yang memperoleh bantuan sebanyak 300 orang dan terealisasi sebanyak 681 orang dengan perhitungan 337 mahasiswa gelombang kedua penerima tahun 2016 dan 344 mahasiswa gelombang pertama tahun 2017. Sehingga realisasi sebesar 227%.
8. Angka kelulusan peserta didik
Angka kelulusan peserta didik merupakan puncak pencapaian keberhasilan Pelaksanaan Ujian Nasional yang diselenggarakan setiap tahun pelajaran yang merupakan implementasi fungsi manajemen dari segi evaluasi. Bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam Peraturan Pemerintah No: 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada pasal 66 ayat (1) dijelaskan bahwa “**Ujian Nasional mengukur kompetensi peserta didik dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka**

menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh peserta didik, satuan pendidikan dan atau program pendidikan.”

Berdasarkan pengelolaan nilai / hasil yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendikbud, bahwa tahun pelajaran 2016/2017, angka kelulusan ujian nasional (UN) tahun 2017 ditargetkan mencapai 99,00%, telah tercapai 98,50% atau capaian 99,49% dan belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2017 jumlah siswa Tingkat Sekolah Dasar dan sederajat pada Tingkat Tertinggi tahun sebelumnya 4.929 siswa yang mengikuti dan lulus Ujian sebanyak 4.853 siswa sedangkan untuk jumlah siswa Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan sederajat pada Tingkat Tertinggi tahun sebelumnya 4.704 siswa yang mengikuti dan lulus Ujian sebanyak 4.627 siswa atau secara keseluruhan baru mencapai 98,50%

9. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan

Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan, seperti: Gedung, ruangan **belajar**/kelas, alat-alat atau **media** pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas/**prasarana** adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun/taman sekolah, jalan menuju ke sekolah.

Fasilitas **pendidikan** pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah (site, building, equipment, and furniture). Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik. Manajemen yang dimaksud meliputi: (1) Perencanaan, (2) Pengadaan, (3) Inventarisasi, (4) Penyimpanan, (5) Penataan, (6) Penggunaan, (7) Pemeliharaan, dan (8) Penghapusan.

Jadi, secara umum **sarana dan prasarana** adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Standar **sarana dan prasarana pendidikan** telah diatur dalam PP No.32 tahun 2013 dikatakan Standar **Sarana dan Prasarana** adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 69,69% dan terealisasi sebesar 76,12% atau terealisasi sebesar 109,23%.

10. Presentase kedisiplinan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik
Kedisiplinan merupakan salah satu faktor keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Guru, Murid dan Tenaga Kependidikan yang disiplin akan membawa dampak positif bagi perkembangan pembelajaran, maka diperlukan dedikasi dan tanggung jawab yang

tinggi. Seorang guru dituntut untuk bisa mempengaruhi mengolah pola pikir, memiliki wawasan yang luas, juga harus memiliki kompetensi yang mumpuni, baik ilmu kependidikan, metodologi, atau disiplin ilmu yang akan diajarkannya

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sinjai ikut ambil peran melakukan penegakan disiplin di kalangan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan siswa tingkat satuan pendidikan

Untuk tahun 2017 ditargetkan jumlah siswa pendidik dan tenaga kependidikan yang terjangkau satpol PP sebanyak guru 5 orang, tenaga kependidikan 5 orang dan siswa 25 orang namun hasil dari kegiatan ini didapat 0 untuk guru 0 untuk tenaga kependidikan dan 0 untuk siswa sehingga tingkat kedisiplinan yang berkarakter mencapai 100%.

B. Analisis Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
	2014	2015	2016	2017
Angka Melek Huruf	99,44	93,47	100	100
APK PAUD	63,19	91,51	92	96,52
APK SD	101,25	105,63	105,83	113,98
APK SMP	109,12	109,04	103,86	115,35
APM SD	98,56	87,99	100	100
APM SMP	95,93	79,84	98	100
kualifikasi pendidikan tenaga pendidik	1943	2130	2202	1797
Jumlah Siswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu	162	162	162	141
Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu	75	300	500	681
Angka Kelulusan Peserta Didik	98,70	99,30	99,36	98,50
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	66,29	73,84	80,66	76,12
Prosentase Kedisiplinan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik	0	0	0	0
	0	0	0	0
	70	65	55	0

1. Angka Melek Huruf

Penduduk buta aksara berdasarkan tingkat usia tahun 2009 by name by address sebanyak 11.787 orang data ini akan dituntaskan hingga tahun 2018 sehingga sinjai bebas buta aksara tahun 2018 target 2018 ternyata

tercapai di tahun 2015 sehingga jumlah penduduk buta aksara yang telah terdata telah melek huruf 100% ditahun 2015 sehingga kegiatan penuntasan buta aksara di tahun 2017 sudah tidak dilaksanakan karena telah mencapai target. Data terampir

2. APK PAUD

Angka Partisipasi Kasar untuk PAUD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan berdasarkan tabel diatas tahun 2014 mencapai 63,19% meningkat menjadi 96,52% ditahun 2017 hal ini adalah bukti nyata peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

3. APK SD

Angka Partisipasi Kasar untuk SD meningkat secara signifikan hal ini terlihat dari presentase tahun 2014 APK mencapai 101,25% meingkat menjadi 113,98% ditahun 2017.

4. APK SMP

Angka Partisipasi Kasar untuk SMP meningkat secara signifikan hal ini terlihat dari presentase tahun 2014 APK mencapai 109,12% meingkat menjadi 115,35% ditahun 2017.

5. APM SD

Peningkatan Angka Partisipasi Murni untuk SD sederajat dari tahun 2014 98,56% dan ditahun 2017 menjadi 100% hal ini bukti bahwa semua anak usia 7-12 tahun telah tertampung malah lebih disebabkan adanya dari daerah lain namun yang terdata hanya siswa yang murni.

6. APM SMP

Peningkatan Angka Partisipasi Murni untuk SMP sederajat dari tahun 2014 95,93% dan ditahun 2017 menjadi 100% hal ini bukti bahwa semua anak usia 13-15 tahun telah tertampung malah lebih disebabkan adanya dari daerah lain namun yang terdata hanya siswa yang murni.

7. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik

Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik tahun 2014 jumlah guru yang telah bersertifikasi sebanyak 1943 guru jumlah ini meningkat dari tahun ketahun hingga tahun 2017 telah mencapai 1797 guru. Dari data diatas terlihat ada penurunan hal ini disebabkan karna peralihan kewenangan sehingga SMA sederajat beralih menjadi kewenangan provinsi.

8. Jumlah Siswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu

Guna peningkatan mutu lulusan pemerintah Kabupaten Sinjai melaksanakan kegiatan guna memberikan bantuan dana pendidikan kepada siswa siswi yang berprestasi agar dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Setiap tahunnya telah ditargetkan penerima sebanyak 162 siswa(i) berprestasi mendapatkan bantuan. Pada tahun 2017 hanya 141 siswa(i) yang mendapatkan dikarenakan peralihan wewenang sehingga SMA sederajat beralih ke Provinsi.

9. Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu

Sebagai wujud perhatian pemerintah Kabupaten Sinjai terhadap para mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi pendidikannya maka pemerintah melaksanakan kegiatan yang membantu mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhirnya. Kegiatan ini mendapat sambutan positif terbukti dari membludaknya jumlah penerima bantuan yang ditargetkan

setiap tahun hanya 300 Mahasiswa(i) namun realisasinya ditahun 2017 mencapai 681 Mahasiswa(I)

10. Angka kelulusan Peserta Didik
Angka kelulusan peserta didik merupakan puncak pencapaian keberhasilan Pelaksanaan Ujian Nasional yang diselenggarakan setiap tahun pelajaran yang merupakan implementasi fungsi manajemen dari segi evaluasi. Angka kelulusan peserta didik dari tahun ketahun mengalami pasang surut tahun 2014 angka kelulusan mencapai 98,70 dan ditahun 2017 hanya mencapai 98,50 persen hal ini dikarenakan adanya siswa yang masih terdata namun tidak mengikuti ujian.
11. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Guna peningkatan kualitas pendidikan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sangat dibutuhkan bila dibandingkan tahun 2014 presentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan meningkat dari 66,29% ditahun 2014 menjadi 76,12% adapun perbedaan presentase yang lebih rendah dari tahun 2016 dikarenakan adanya peralihan wewenang untuk tingkat SMA sederajat.
12. Prosentase Kedisiplinan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik
Tingkat kedisiplinan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik dari tahun 2014 meningkat secara signifikan ditahun 2014 jumlah pelanggaran untuk peserta didik yang terjaring Satpol PP sebanyak 70 Kasus dan menurun terus hingga ditahun 2017 tidak terdapat lagi pelanggaran baik itu pendidik, tenaga Pendidikan maupun peserta didik.

C. Perbandingan Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pendidikan dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	Angka Melek Huruf	Persen	100	100	100,00
2	APK PAUD	Persen	72,5	96,52	133,13
3	APK SD	Persen	101,5	113,98	112,30
4	APK SMP	Persen	99,4	115,35	116,05
5	APM SD	Persen	88,6	100	112,87
6	APM SMP	Persen	80	100	125,00
7	kualifikasi pendidikan tenaga pendidik	Pendidik	1900	1791	94,26
8	Jumlah Siswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu	siswa	162	141	87,04

9	Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu	mahasiswa	300	681	227,00
10	Angka Kelulusan Peserta Didik	Persen	99,1	98,50	99,39
11	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persen	74	76,12	102,86
	Prosentase Kedisiplinan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik	Guru	10	0	100,00
		Pegawai	10	0	100,00
		Siswa	10	0	100,00

Berdasarkan tabel diatas sudah terlihat beberapa indikator telah mencapai target sebelum tahun yang ditetapkan diantaranya Angka Melek Huruf sudah mencapai target sejak tahun 2016, APK Paud sedah melebihi target yang ditetapkan, APK juga telah melebihi target begitu juga APM, jumlah mahasiswa yang menerima bantuan, pemenuhan sarana dan prasarana dan tingkat kedisiplinan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.

1. Respon positif dari masyarakat dalam menanggapi program-program pemerintah dibidang pendidikan utamanya Program Pembebasan Biaya Pendidikan sehingga animo masyarakat untuk bersekolah semakin meningkat
2. Kondisi ekonomi masyarakat yang semakin maju mendorong tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk masa depan bangsa
3. Pengawasan Manajemen pembangunan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis hal ini terlihat dari penggunaan dana yang efektif dan efisien dengan hasil yang maksimal
4. Adanya kebulatan tekad Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan Layanan Pendidikan Untuk melaksanakan Program Wajib Belajar 9 Tahun melalui program Pendidikan Gratis. Selain itu adanya perhatian Pemerintah Kabupaten Sinjai terhadap lulusan pendidikan menengah agar tidak terjadi drop out maka berupaya mendorong angka melanjutkan untuk ke Perguruan Tinggi dengan memberikan Tabungan Siswa Berprestasi ditahun pelajaran akademik baru dan pemberian beasiswa berprestasi kepada mahasiswa. Perhatian Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui program Pendidikan Gratis didasari dari amanat Undang – Undang Dasar 1945 pada Amandemen ke 4;
 - a. Pasal 30 ayat (4) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menyediakan anggaran pendidikan.
 - b. Pasal 31 ayat (1) ”Pendidikan merupakan hak warga negara Indonesia”
 - c. Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan beberapa pasal antara lain:
 - a. Pasal 5 ayat (1), “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pada ayat (5) menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”

- b. Pasal 6 ayat (1) “ setiap warga negara yang berusia 7 s.d. 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”
5. Pengoptimalan sumberdaya yang ada utamanya sumberdaya manusia dengan pola pemberdayaan untuk melakukan analisis, pemetaan, validasi dan sebagainya. Dalam upaya mengoptimalkan sumberdaya tersebut diusahakan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. dengan prinsip penghematan, efisiensi dan efektivitas serta penyusunan jadwal yang tepat, ketat dan simultan dan atau berkesinambungan.
 6. Pelaksanaan monitoring yang kontinyu sebagai upaya untuk melihat kesesuaian rencana dan pelaksanaan. Dalam monitoring ini dapat dilakukan dalam dua cara masing – masing monitoring langsung yaitu melakukan kunjungan dengan obyek kegiatan, rapat – rapat berkala dan monitoring tidak langsung yaitu mempelajari laporan – laporan yang disampaikan baik laporan bulanan, triwulan dan tahunan. Hasil monitoring dilakukan dengan evaluasi sebagai bahan untuk merumusan kebijakan dimasa datang
 7. Semakin optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang tercapainya pelaksanaan program-program pendidikan serta makin baiknya kondisi infrastruktur yang menjadi motor penggerak utama kelancaran aktifitas pendidikan

Walau demikian ada pula beberapa indikator yang belum mencapai target yaitu Kualifikasi pendidikan tenaga kependidikan baru, Jumlah Siswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu, Angka Kelulusan Peserta Didik hal ini disebabkan

1. Adanya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat menjadi kewenangan provinsi.
2. Masih rendahnya kualitas dan mutu pendidik, belum maksimalnya penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran sehingga kurang menarik minat siswa untuk belajar secara mandiri dan menemukan solusi dan pemecahan soal-soal pelajaran sehingga mereka hanya mengacu pada soal-soal tahun sebelumnya yang tentunya sudah kadaluarsa sehingga mempengaruhi angka kelulusan.

PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAKA KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2016

No	Program SKPD Tahun 2016	Uraian					
		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3		4	5	6	7
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Input	Dana	Rp	979.620.400	817.240.400	83,42
		Output	Terlaksananya Kegiatan PAUD	Kegiatan	6	6	100
		Outcome	APK PAUD	Persen	72,19	96,52	133,70
		Capaian Rata-Rata Program 1					133,70
2.	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Input	Dana	Rp	9.540.980.530	9.423.312.350	98,77
		Output	Terlaksananya Kegiatan Wajar 9 Tahun	Kegiatan	14	14	100
		Outcome	APM SD	Persen	99,35	100	100,65
			APK SD	Persen	101,45	113,98	112,35
			Angka Kelulusan Peserta Didik	Persen	99	98,50	99,49
		Capaian Rata-Rata Program 2					104,16
3.	Pendidikan Menengah	Input	Dana	Rp	22.864.900	22.864.900	100

	Pertama	Output	Terlaksananya Kegiatan SMP	Kegiatan	1	1	100
		Outcome	APM SMP APK SMP	Persen	79,95	100	125,08
				Persen	99,35	115,35	116,10
				Capaian Rata-Rata Program 3			120,59
4.	Pendidikan Non Formal	Input	Dana	Rp	87.979.300	87.979.300	100
		Output	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Non Formal	Kegiatan	1	1	100
		Outcome	Jumlah Buta Huruf yang dientaskan menjadi melek huruf	Persen	100	100	100
					Capaian Rata-Rata Program 4		100
5.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Input	Dana	Rp	198.148.680	196.643.680	99,24
		Output	Terwujudnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan	3	3	100
		Outcome	Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik	Guru	2000	1791	89,55
			Prosentase kedisiplinan pendidik,	Guru	5	0	100
			tenaga kependidikan dan	Pegawai	5	0	100
				Siswa	25	0	100

			peserta didik		Capaian Rata-Rata Program 5		97,38		
6.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Input	Dana	Rp	546.098.300	545.097.350	99,82		
		Output	Meningkatnya tata kelola manajemen pelayanan pendidikan	Kegiatan	3	3	100		
		Outcome	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Sekolah	73	76,12	104,27		
					Capaian Rata-Rata Program 6		102,13		
7.	Pembebasan Biaya Sekolah	Input	Dana	Rp	7.423.352.000	7.335.253.500	98,81		
		Output	Terlaksananya Kegiatan Pembebasan Biaya Sekolah	Kegiatan	5	5	100		
		Outcome	Jumlah Siswa Yang Mendapat Bantuan Biaya Pendidikan	%	162	141	87,04		
					Jumlah Mahasiswa yang mendapat Bantuan Biaya Pendidikan	%	300	679	227,00
							Capaian Rata-Rata Program 7		157,02
8.	Bantuan Operasional Sekolah	Input	Dana	Rp	32.722.800.000	29.749.941.526	90,92		

		Output	Terlaksananya Bantuan Operasional Sekolah	Kegiatan	1	1	100
		Outcome	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	93,00	114,67	123,30
					Capaian Rata-Rata Program 8		123,30

D. Analisis Penyebab Keberhasilan

- a. Respon positif dari masyarakat dalam menanggapi program-program pemerintah dibidang pendidikan utamanya Program Pembebasan Biaya Pendidikan sehingga animo masyarakat untuk bersekolah semakin meningkat
- b. Kondisi ekonomi masyarakat yang semakin maju mendorong tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk masa depan bangsa
- c. Pengawasan Manajemen pembangunan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis hal ini terlihat dari penggunaan dana yang efektif dan efisien dengan hasil yang maksimal
- d. Adanya kebulatan tekad Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan Layanan Pendidikan Untuk melaksanakan Program Wajib Belajar 9 Tahun melalui program Pendidikan Gratis. Selain itu adanya perhatian Pemerintah Kabupaten Sinjai terhadap lulusan pendidikan menengah agar tidak terjadi drop out maka berupaya mendorong angka melanjutkan untuk ke Perguruan Tinggi dengan memberikan Tabungan Siswa Berprestasi ditahun pelajaran akademik baru dan pemberian beasiswa berprestasi kepada mahasiswa. Perhatian Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui program Pendidikan Gratis didasari dari amanat Undang – Undang Dasar 1945 pada Amandemen ke 4;
 1. Pasal 30 ayat (4) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menyediakan anggaran pendidikan.
 2. Pasal 31 ayat (1) ”Pendidikan merupakan hak warga negara Indonesia”
 3. Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan beberapa pasal antara lain:
 - a. Pasal 5 ayat (1), “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pada ayat (5) menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”
 - b. Pasal 6 ayat (1) “ setiap warga negara yang berusia 7 s.d. 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”
- e. Pengoptimalan sumberdaya yang ada utamanya sumberdaya manusia dengan pola pemberdayaan untuk melakukan analisis, pemetaan, validasi dan sebagainya. Dalam upaya mengoptimalkan sumberdaya tersebut diusahakan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. dengan prinsip penghematan, efisiensi dan efektivitas serta penyusunan jadwal yang tepat, ketat dan simultan dan atau berkesinambungan.
- f. Pelaksanaan monitoring yang kontinyu sebagai upaya untuk melihat kesesuaian rencana dan pelaksanaan. Dalam monitoring ini dapat dilakukan dalam dua cara masing – masing monitoring langsung yaitu melakukan kunjungan dengan obyek kegiatan, rapat – rapat

berkala dan monitoring tidak langsung yaitu mempelajari laporan – laporan yang disampaikan baik laporan bulanan, triwulan dan tahunan. Hasil monitoring dilakukan dengan evaluasi sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan dimasa datang

- g. Semakin optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang tercapainya pelaksanaan program-program pendidikan serta makin baiknya kondisi infrastruktur yang menjadi motor penggerak utama kelancaran aktifitas pendidikan.
- h. Banyaknya jumlah mahasiswa (i) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah Kabupaten Sinjai yaitu 1083 pendaftar dan yang memenuhi syarat sebanyak 681 mahasiswa(i) dari semua perguruan tinggi
- i. Tingginya kesadaran Mahasiswa untuk segera menyelesaikan studinya dengan kriteria yang dipersyaratkan sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas
- j. Bentuk dukungan masyarakat terhadap perhatian Pemerintah Kabupaten Sinjai yang memberikan reward kepada mahasiswa(i) yang memiliki prestasi akademik

I. PENGHARGAAN DARI TINGKAT PROVINSI/KAB. TAHUN 2017

Pada tahun 2017, Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini memperoleh beberapa penghargaan berupa:

- 1. Juara I Lomba Karya Nyata Tutor Paket B Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Ismail, S.Pd Tutor Paket B PKBM Todilaling Kab. Sinjai
- 2. Juara I Lpmba Karya Nyata Tutor Pekt A Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Maedianah, S.Si, Tutor Paket A PKBM Kecerdasan Anak Bangsa Kab. Sinjai

E. Analisis Penyebab Kegagalan dan Alternative Solusi yang telah dilakukan

- 1. Walau semua indikator telah mencapai hasil yang diharapkan namun terjadi ketidakselarasan antara data Angka Melek Huruf pada Dinas Pendidikan dan BPS yang mana untuk versi Dinas Pendidikan Penuntasan Program untuk meningkatkan Angka Melek Huruf telah tuntas 100% sementara data BPS masih tersisa sebanyak 6.172 orang.
Solusi dari ketidakcapaian ini adalah akan diadakan penelusuran ulang / pendataan ulang by name by address untuk pencocokan data.
- 2. Adanya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat menjadi kewenangan provinsi.

Solusi dari hal ini adalah diadakan perbaikan nilai indikator berdasarkan kewenangan daerah.

3. Masih rendahnya kualitas dan mutu pendidik, belum maksimalnya penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran sehingga kurang menarik minat siswa untuk belajar secara mandiri dan menemukan solusi dan pemecahan soal-soal pelajaran sehingga mereka hanya mengacu pada soal-soal tahun sebelumnya yang tentunya sudah kadaluarsa sehingga mempengaruhi rendahnya nilai kelulusan.

Solusi untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan adalah dengan sosialisasi pengelolaan sarana dan prasarana, penyempurnaan kurikulum melalui KKG, KKS dan Pelatihan, Diklat dan Bimtek, panduan pengembangan diri, peningkatan prestasi akademik dan non akademik melalui kegiatan Kurikuler dan Ekstrakurikuler, peningkatan kesejahteraan guru, dan pemerataan guru.

F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja / Perjanjian Kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan adalah sebesar Rp. 54.035.772.634,70 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 52.204.685.862,00 atau 96,61% dengan rata-rata capaian kinerja 100% sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,39%.

G. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD. Kegiatan pendukung Program ini sebanyak

- a. Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pagar Lembaga Paud
- b. BOP PAUD (DAK)
- c. WORKSHOOP BUNDA PAUD
- d. Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- e. Kegiatan Pengembangan Gugus PAUD
- f. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidikan PAUD

- b. Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan dasar, pemerintah Kabupaten Sinjai telah melakukan berbagai upaya terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat, kegiatan ini ditunjang sebanyak 14 Kegiatan yaitu:

- a. Lomba Kreatifitas Siswa

- b. Olimpiade Mipa SD
- c. Pengembangan Gugus Tingkat SD
- d. Pelaksanaan UASBN Tingkat SD
- e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (DAK SD)
- f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun (DAU SD dan SMP)
- g. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAK SMP)
- h. Workshop Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Pertama (SPM SMP)
- i. Workshop Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SNP SMP)
- j. Pembinaan MGMP dan MKKS Berbasis Gugus SMP
- k. Olimpiade Sains Tingkat SMP
- l. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD
- m. Fasilitas Festival Lomba Seni Siswa SMP
- n. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMP
- c. Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Menengah adalah salah satu program pendukung keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 31 ayat (3) tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, kegiatan ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Tingkat SMP

- d. Program Pendidikan Non Formal

Agar Masyarakat memiliki kemampuan mengembangkan potensinya dalam rangka pemberdayaan masyarakat maka peran pendidikan nonformal sangat strategis. Pendidikan Luar sekolah, atau pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan yang terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapam, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam mencapai tujuan belajarnya (Coombs, dalam Sudjana, 2000: 23)

Program pendidikan Nonformal sebagaimana tercantum dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaaan, pendidikan pemberdayaan perempuan pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Program ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu Pendidikan

Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Lanjutan

e. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru memegang peranan strategis terutama dalam membentuk karakter bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Peran dan posisi guru tidak dapat digantikan sekalipun oleh teknologi yang amat canggih. Begitu penting arti guru bagi kita, sehingga sudah selayaknya apabila kita menaruh perhatian besar terhadap keberadaan guru agar dapat berkiprah secara profesional sesuai harapan semua pihak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam konsiderannya, menjelaskan bahwa Guru profesional harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (USPN 20/2003, Bab I pasal 6). Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang menjelaskan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Program ini didukung dengan 3 kegiatan yaitu:

- a. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
- b. Workshop Pembuatan Aplikasi Penilaian Pembelajaran
- c. Rekrutmen Asesor Penilaian Kinerja

f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pelayanan yang menjadi produk asli dari organisasi pemerintahan adalah pelayanan masyarakat (Publik Service), pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat baik layanan sipil maupun publik artinya kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak dan melekat pada setiap orang baik secara pribadi maupun berkelompok (organisasi). Kegiatan ini didukung oleh 7 kegiatan yaitu:

- a. Dewan Pendidikan
- b. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
- c. Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan
- d. Penyusunan Profil Pendidikan
- e. Seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Berprestasi
- f. Penertiban Anak Sekolah dan Tenaga Pendidik pada Jam Sekolah
- g. Manajemen Pelaporan dan Pengelolaan BOS Tingkat SD

g. Pembebasan Biaya Pendidikan

Pembebasan biaya sekolah merupakan upaya pemerintah Kabupaten Sinjai untuk memberikan dorongan dan bantuan kepada peserta didik agar dapat mengikuti studinya dengan lancar dan diharapkan terus meningkatkan prestasi akademik serta dapat menyelesaikan

pendidikannya tepat waktu kegiatan ini didukung oleh 5 kegiatan yaitu:

- a. Tabungan Siswa Berprestasi
- b. Pemberian Penghargaan kepada Mahasiswa Berprestasi
- c. Pendidikan Gratis (Kesra)
- d. Sosialisasi Juknis Advokasi berbagai Peraturan Pemerintah dibidang Pendidikan
- e. Penyusunan Rencana Perda Penyelenggaraan Pendidikan
- h. Bantuan Operasional Sekolah
BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan dewan guru dan Komite Sekolah. Dalam hal pengelolaan BOS menggunakan MBS, maka SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK harus mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan, melakukan evaluasi setiap tahun, menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Program ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

3.2. REALISASI ANGGARAN

Untuk analisis efektifitas dan analisis anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai saling terkait antara sasaran yang satu dengan lainnya.

Namun demikian pada paragraf berikut ini merupakan penjelasan singkat penggunaan anggaran Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sinjai tahun 2017 dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran.

Pagu awal belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dalam DPA 2017 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai tahun 2017 sebesar **Rp. 20.296.972.634,70-**

Pagu tersebut dialokasikan pada 8 (delapan) program wajib yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Dalam pelaksanaannya total pagu yang dialokasikan tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar **Rp. 54.035.772.634,70.**

Berikut tabel pengalokasian anggaran tahun 2017 pada 8 (delapan) program wajib Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.

No	PROGRAM	PAGU SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU SETELAH PERUBAHAN (Rp)
A	PROGRAM RUTIN		
1.	Pelayana Administrasi Perkantoran	1.410.667.554,70	1.423.937.554,70
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	451.450.520	497.750.520
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	526.588.200	465.898.200
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	115.622.250	126.342.250
B	PROGRAM WAJIB		
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	998.060.400	979.620.400
2.	Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	9.025.460.530	9.540.980.530
3.	Program Pendidikan Menengah	22.864.900	22.864.900
4.	Pendidikan Non Formal	87.979.300	87.979.300
5.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	198.148.680	198.148.680
6.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	562.778.300	546.098.300
7.	Pembebasan Biaya Pendidikan	6.897.352.000	7.423.352.000
8.	Bantuan Operasional Sekolah	0	32.722.800.000
	TOTAL	20.296.972.634,70	54.035.772.634,70

Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai tahun 2017 sebesar **Rp. 54.035.772.634,70,-** yang tersebar ke lima bidang seperti terlihat dalam tabel diatas digunakan untuk membiayai 4 program rutin dan 8 program wajib yang terbagi dalam 59 kegiatan. Dari pagu anggaran **Rp. 54.035.772.634,70,-** yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar **Rp. 52.204.685.862,00** sehingga persentase daya serap anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai sampai Desember 2017 adalah sebesar **96,61%**.

Berikut realisasi kinerja keuangan pada delapan program wajib dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan:

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD

Upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menunjukkan peningkatan. Program Pendidikan Anak Usia Dini untuk tahun 2017, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang *Sangat Tinggi*. Capaian ini juga menyumbang sebanyak 133,70 % dari target, target tahun 2017 adalah 72,19% dan realisasi sebesar 96,52%. Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya dipengaruhi oleh Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Program ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan yaitu:

a. Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pembangunan Pagar Lembaga PAUD.

Gambaran umum mengenai keluaran (output) kegiatan dan volume yang akan dilaksanakan dan dicapai adalah bahwa bangunan ruang kelas dan pagar untuk lembaga PAUD sangat dibutuhkan untuk kenyamanan proses belajar serta menjaga keamanan lingkungan sekolah, baik keamanan anak didik dari ancaman kendaraan begitu pula dengan keamanan asset sekolah khususnya bangunan dan asset yang ada diluar ruangan seperti APE luar, dengan adanya dana bantuan pembangunan RKB dan pagar, maka ada 4 lembaga PAUD yang diprioritaskan telah mendapatkan bangunan tersebut dengan waktu pelaksanaan selama 3 bulan dan terealisasi 100%. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah Rp. 434.500.000 terealisasi sebesar Rp. 433.870.000,- atau sebesar 99,86% sisa dana sebesar Rp. 630.000,- adalah hasil penawaran dengan pihak ketiga.

b. BOP PAUD (DAK)

Pelaksanaan kegiatan BOP PAUD bertujuan untuk membantu penyediaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang diberikan kepada satuan PAUD dan satuan pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan Program PAUD. Waktu pelaksanaan BOP PAUD (DAK) selama 12 bulan dengan jumlah lembaga penerima sebanyak 3 TK Negeri. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan realisasi fisik 100%. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 346.800.000 dengan realisasi sebesar Rp. 185.400.000,- atau 53,46% sisa dana sebesar 161.400.000 dikarenakan realisasi anggaran berdasarkan petunjuk teknis baru yang didalamnya tidak memuat belanja modal pengadaan Buku/Modul Perpustakaan.

c. Work Shop Bunda PAUD

Work Shop Bunda PAUD adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengembangan kemampuan bunda

pada khususnya Bunda PAUD desa/Kelurahan dalam memberikan dorongan penguatan dan perluasan akses layanan PAUD di Kabupaten Sinjai sehingga bunda PAUD desa/kelurahan mampu menggerakkan potensi masyarakat dalam memfasilitasi perluasan akses peningkatan layanan kualitas PAUD secara holistik integrative sehingga dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.

Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali kegiatan dengan jumlah peserta 80 orang dengan realisasi kegiatan 100%. Dana yang dialokasikan pada kegiatan ini sebesar Rp. 24.803.000 dengan realisasi kegiatan 100%.

d. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

kegiatan yang mendukung pelaksanaan program PAUD dengan menitikberatkan pada pengadaan ATK, Sertifikat dan Buku Laporan Pendidikan serta pemberian insentif kepada tenaga pendidik yang menjadi kebutuhan mendasar di lembaga PAUD sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan jumlah 327 Lembaga dengan realisasi kegiatan 100%. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 101.758.300,- dan terealisasi 100%.

e. Pengembangan gugus PAUD

Pengembangan Gugus PAUD diharapkan mampu meramu kegiatan pembelajaran lewat jalinan komunikasi yang baik antar komponen sekolah untuk melahirkan inovasi-inovasi pembelajaran. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan yang diikuti oleh 55 Gugus PAUD dan terealisasi 100%. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah Rp. 50.711.800,- terealisasi sebesar Rp. 50.711.800,0 atau 100%.

f. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidikan PAUD

Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidikan APUD adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru pada tingkat PAUD agar lebih baik guna peningkatan profesionalisme guru yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan yang diikuti oleh 40 Peserta dan terealisasi 100%. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah Rp. 21.047.300,- terealisasi sebesar Rp. 20.697.300,- atau 98,34% dengan sisa dana sebesar Rp. 350.000,- karena double anggaran sehingga dana tidak dicairkan.

b. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan dasar, pemerintah Kabupaten Sinjai telah melakukan berbagai upaya terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat. Program ini didukung oleh 14 (empat belas) kegiatan yaitu:

1. Lomba Kreatifitas Siswa

Lomba Kreatifitas Siswa adalah kegiatan yang dilaksanakan guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 99 siswa pada 10 Hari besar nasional dengan capaian realisasi fisik 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 32.698.500,- terealisasi sebesar Rp. 32.318.500 atau 98,84% sisa dana yang tidak dicairkan Rp. 380.000 adalah sisa

belanja perjalanan dinas luar daerah yang telah disesuaikan dengan real cost.

2. Olimpiade MIPA

Olimpiade MIPA bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing siswa di bidang Sains kegiatan ini diikuti oleh 54 siswa dan masuk dalam 10 besar tingkat provinsi dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.808.780,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.808.700 atau 100%.

3. Penembangan Gugus Tingkat SD

Untuk meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SD maka dilaksanakanlah kegiatan Pengembangan Gugus Tingkat SD kegiatan ini diikuti oleh 33 gugus SD sehingga realisasi pelaksanaan kegiatan berjalan 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 176.666.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 176.666.000,- atau 100%

4. Pelaksanaan UASBN Tingkat SD

Pelaksanaan UASBN Tingkat SD bertujuan untuk Menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); dan Mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu waktu pelaksanaan 1 kali kegiatan dengan jumlah sekolah sebanyak 242 Sekolah Dasar dengan hasil kinerja fisik 100%. Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 323.256.000,- terealisasi sebesar Rp. 322.539.000,- atau 99,78% sisa dana yang tidak dicairkan sebesar Rp. 717.000.000,- adalah sisa belanja cetak yang disesuaikan dengan rill cost.

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (DAK SD)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (DAK SD) adalah kegiatan rutin untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang sekolah dasar dengan Output Jumlah ruang kelas yang direhab, jumlah ruang kelas baru, dan jumlah paket buku perpustakaan dengan waktu pelaksanaan selama 6 bulan dengan total 10 sekolah rehabilitas kelas, 2 sekolah pembangunan RKB, dan 28 sekolah penerima paket buku perpustakaan. Hasil dari kegiatan tersebut telah mencapai realisasi fisik 100%. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.653.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.637.312.000,- atau 99,57% sisa dana yang tidak dicairkan sebesar Rp. 15.688.000,- adalah sisa tender.

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar 9 Tahun (DAU SD dan SMP)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (DAU SD dan SMP) dilaksanakan selama 6 bulan untuk pembangunan 1 Ruang Kelas Baru, 3 perpustakaan, 4 perumahan guru, 2 WC, 911 meter pagar, 3 kelas rehap ruang dengan realisasi fisik 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.092.875.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.087.723.000,- atau 99,83% sisa dana yang tidak

- dicairkan sebesar Rp. 15.688.000,- adalah sisa dana tender.
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAK SMP)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAK SMP) adalah kegiatan rutin untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang sekolah dasar dengan Output 6 sekolah rehabilitas, 2 sekolah pembangunan ruang perpustakaan, dan 12 sekolah media pembelajaran dengan waktu pelaksanaan selama 6 bulan. Hasil dari kegiatan tersebut telah mencapai realisasi fisik 100%. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.898.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.840.870.000,- atau 96,99% sisa dana yang tidak dicairkan sebesar Rp. 57.130.000,- adalah sisa tender.
 8. Work Shop Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Pertama (SPM SMP)
Work Shop Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Pertama (SPM SMP) adalah kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pada satuan pendidikan guna meningkatkan mutu layanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 21.563.500,- dengan realisasi anggaran 100% dan realisasi kegiatan 100%. Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 kegiatan dengan jumlah peserta 41 sekolah dengan peningkatan tingkat pemahaman peserta sebesar 95%
 9. Work Shop Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SNP SMP)
Work Shop Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SNP SMP) adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mutu dan daya saing pendidikan serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik. Kegiatan ini dilaksanakan 1 kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 41 orang. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 24.256.500,- dengan realisasi anggaran 100% (Rp. 24.256.500,-)
 10. Pembinaan MGMP dan MKKS berbasis Gugus SMP
Pembinaan MGMP dan MKKS berbasis Gugus SMP adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menjadi acuan bagi satuan pendidikan SD/MI/SDLB dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan Dasar Output dari kegiatan ini adalah 10 Mapel Outcome adalah jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan proses Belajar Mengajar (PBB) yang sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 97.982.500,- dan terealisasi 100%. (Rp 97.982.500,-)
 11. Olimpiade Sains Tingkat SMP
Olimpiade Sains Tingkat SMP adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing siswa tingkat SMP dengan realisasi fisik sebesar 100% kegiatan yang dilombakan sebanyak 3 mata pelajaran yang diikuti oleh 288 Siswa/i.

Walau belum mengukur prestasi namun telah berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 33.660.600,- terealisasi sebesar Rp. 28.350.600,- atau 84,22% sisa dana yang tidak dicairkan sebesar Rp. 5.310.000,-

12. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat SD
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat SD bertujuan untuk membina prestasi siswa di bidang olahraga yang diikuti oleh 242 sekolah dengan realisasi kegiatan 100%. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 54.155.500 dan terealisasi sebesar Rp. 52.115.500,- atau 96,23% sisa dana yang tidak dicairkan sebesar Rp. 2.040.000.
13. Fasilitas Festival Lomba Seni Siswa SMP
Fasilitas Festival Lomba Seni Siswa SMP adalah kegiatan yang bertujuan untuk Meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik untuk mengespresikan diri melalui kegiatan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya dengan realisasi kegiatan 100%. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 59.073.150,- dan realisasi sebesar Rp. 50.985.650,- atau 86,31% sisa dana sebesar Rp. 8.087.500,-
14. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat SMP
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat SMP bertujuan untuk membina prestasi siswa di bidang olahraga yang diikuti oleh 47 sekolah dengan realisasi kegiatan 100%. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.911.400 dan terealisasi sebesar Rp. 56.791.400,- atau 74,81% sisa dana yang tidak dicairkan sebesar Rp. 19.120.000,-

c. Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Menengah dan Kejuruan adalah salah satu program pendukung keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 31 ayat (3) tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Program Pendidikan Menengah yang dimaksud adalah Program Pendidikan Menengah Pertama sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, Penyelenggaraan. Program ini didukung oleh 1 (Satu

1. Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) tingkat SMP untuk mengukur prestasi akademis siswa tingkat SMP. Waktu pelaksanaan selama 1 bulan dengan mata pelajaran yang diujikan sebanyak 6 mapel capaian pelaksanaan kegiatan ini secara fisik

terrealisasi 100%. Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 22.864.900,- dengan realisasi Rp. 22.864.900 atau sebesar 100.

d. Pendidikan Non Formal

Pendidikan Non Formal adalah pendidikan yang konsep dari pendidikan seumur hidup dimana kebutuhan akan pendidikan tidak hanya pada pendidikan formal saja. Pendidikan Non Formal merupakan komunikasi yang teratur dan terarah diluar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan dengan tujuan meningkatkan tingkat keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi manusia yang efektif dan efisien dalam lingkungan keluarga dan negara. Program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yaitu:

1. Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Lanjutan

Kegiatan pendidikan keaksaraan Usaha Mandiri adalah kegiatan yang dilaksanakan sebagai kelanjutan dari keaksaraan fungsional Dasar kegiatan ini diikuti oleh 200 Orang. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 87.979.300 dengan realisasi sebesar Rp. 87.979.300 dengan realisasi 100%.

e. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah program yang dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang mana dalam hal ini Indonesia masih rendah dalam hal mutu pendidik dan tenaga kependidikan untuk itu diadakan berbagai upaya dalam rangka peningkatan mutu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan Prosentase Peningkatan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam prose Pembelajaran. Kegiatan ini ditargetkan 85% dengan realisasi 85%. Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

Pelaksanaan sertifikasi Pendidikan adalah kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan sertifikasi pendidikan sehingga pelaksanaan sertifikasi berjalan dengan lancar waktu pelaksanaan selama 12 bulan dengan jumlah pengelola sebanyak 18 orang realisasi kegiatan ini berjalan 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 82.200.500 dengan realisasi sebesar Rp. 82.200.500 atau 100%.

2. Work Shop Pembuatan Aplikasi Penilaian Pembelajaran

Workshop Pembuatan Aplikasi Penilaian Pembelajaran dilaksanakan guna memfasilitasi para pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kemampuan dalam penguasaan TIK guna mengembangkan multimedia pembelajaran kegiatan ini dilaksanakan 1 kali kegiatan dengan peserta sebanyak 47 sekolah SMP dan 242 Sekolah SD realiasi pelaksanaan fisik 100%. Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 78.649.000 dengan realisasi sebesar Rp. 77.144.000,- atau 98,09% sisa dana sebesar Rp. 1.505.000 karena Ketersediaan dana konsumsi melebihi dari jumlah kuota

peserta yang ada

3. Rekrutmen Asesor Penilaian Kinerja

Rekrutmen Asesor Penilaian Kinerja adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memilih Asesor Penilaian Kinerja guna penilaian angka kredit guru kegiatan ini dilaksanakan 1 kali kegiatan dengan jumlah peserta yang memenuhi standar BSNP sebanyak 100 orang dengan realisasi capaian fisik 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 37.299.180 dengan realisasi sebesar Rp. 37.299.180 atau 100%.

f. Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Program ini terealisasi secara fisik 100% dengan 7 kegiatan pendukung.

1. Pembinaan Dewan Pendidikan

Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten. maka Dewan Pendidikan perlu diberdayakan untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal. Pelaksanaan kegiatan Dewan Pendidikan selama 12 bulan pelaksanaan kegiatan ini terealisasi 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 96.804.100 dengan realisasi sebesar Rp. 96.804.100,- atau 100%.

2. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan adalah kegiatan yang dilaksanakan guna mempublikasikan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga secara online melalui website resmi disdikpora.sinjaikab.go.id kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dan terealisasi 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 37.988.500 dengan realisasi sebesar Rp. 37.988.500 atau 100%

3. Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dilaksanakan Untuk mewujudkan akuntabilitas dibutuhkan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan suatu aturan, ukuran dan kriteria sebagai indikator keberhasilan suatu pekerjaan atau perencanaan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan 785 sekolah yang menjadi sasaran monitoring dan evaluasi, laporan hasil monev dan kegiatan ini telah terealisasi 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 71.115.800 dengan realisasi Rp. 71.114.850 atau 100%, sisa dana Rp. 950,- adalah sisa dana dari perbelanjaan yang disesuaikan dengan SBU.

4. Penyusunan Profil Pendidikan

Penyusunan Profil Pendidikan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menyajikan data pendidikan dan non pendidikan yang

bersumber dari data Kuesiner tiap satuan pendidikan yang disebar mulai dari tingkat PAUD, SD Sederajat dan SMP Sederajat serta Pendidikan Kekasaraan Fungsional. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dan telah terealisasi secara fisik 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 111.523.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 111.523.500,- atau 100%.

5. Seleksi Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi

Seleksi Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong motivasi, profesionalisme, kreatif dan inovasi para tenaga pendidik tenaga kependidikan. Kegiatan ini dilaksanakan 1 kegiatan dengan jumlah peserta 129 orang kegiatan ini terealisasi secara fisik 100%. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 32.389.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.389.500,-.

6. Penertiban Anak Sekolah dan Tenaga pendidikan pada jam sekolah

Penertiban Anak Sekolah dan Tenaga Kependidikan pada jam sekolah adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan disiplin dan etos kerja bagi anak sekolah dan tenaga pendidikan kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan menghasilkan 4 dokumen. Kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100%. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 115.059.800,- terealisasi sebesar Rp. 115.059.800,- atau 100%.

7. Manajemen Pelaporan dan Pengelolaan Dana BOS Tingkat SD

Manajemen Pelaporan dan Pengelolaan Dana BOS Tingkat SD adalah kegiatan yang dilaksanakan guna menertibkan pengelolaan dan pelaporan dana BOS. Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 Bulan dengan menghasilkan 4 dokumen dan terealisasi 100%. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 81.217.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 80.217.100,- atau 98,77% sisa dana sebesar Rp. 1.000.000.

g. Pembebasan Biaya Sekolah

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran hak warga negara tersebut tercantum dalam pasal 31 UUD 1945 maka berdasarkan pasal tersebut pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dengan dasar inilah pemerintah melaksanakan Program Pembebasan Biaya Sekolah dalam upaya memberi bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berprestasi. Program kegiatan ini terlaksana dengan sangat memuaskan yaitu realisasi 105,26%. Program ini terdiri atas 4 kegiatan yaitu:

1. Tabungan Siswa Berprestasi

Pemberian Tabungan kepada Peserta didik Berprestasi Tingkat SD / MI, SMP / MTs bertujuan untuk memberikan motivasi kepada peserta didik Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Gratis yang berkualitas, perlu dilakukan secara terpadu,

terintegrasi, sinergi, holistik melalui suatu sistem pembiayaan yang jelas dan tepat sasaran. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 bulan dengan total penerima sebanyak 141 siswa sehingga realisasi fisik terlaksanan 100%. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 141.846.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 141.658.500,- atau 99,87%. Sisa dana sebesar Rp. 187.500 adalah Belanja Cetak sertifikat untuk SMA/K/MA tidak dicairkan karena bukan lagi menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

2. Pemberian Penghargaan Kepada Mahasiswa Berprestasi

Pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi adalah salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademik mahasiswa sinjai serta motivasi berprestasi bagi siswa lain untuk mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah karena tidak mampu. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 bulan dengan jumlah penerima sebanyak 356 terealisasi 344 orang atau terealisasi 100%. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.176.245.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.131.628.000,- atau 100% sisa dana Rp. 44.617.000,- adalah Sisa dana bantuan mahasiswa yang semula direncanakan 356 orang namun yang memenuhi persyaratan hanya 344 orang.

3. Pembebasan Biaya Pendidikan

Pendidikan gratis merupakan wujud komitmen dan kepedulian Pemerintah Daerah dan Masyarakat guna meningkatkan dan perluasan kesempatan belajar serta peningkatan mutu pendidikan di Kabuapten Sinjai khususnya dan di Sulawesi Selatan pada umumnya. Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar dapat dicapai apabila didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan, serta kesejahteraan tenaga pendidik dan pendidikan yang cukup memadai. Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan jumlah sekolah penerima sebanyak 387 sekolah dengan realisasi capaian 100%. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.974.085.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.960.155.600,- atau 99,72%. sisa dana sebesar Rp. 13.930.000,- adalah Sisa dana dari sekolah yang bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu SDLB Kab. Sinjai.

4. Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan

Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan adalah sosialisasi yang dilaksanakan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan peraturan pemerintah di bidang pendidikan kepada semua masyarakat dan stakeholders. Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali kegiatan dengan jumlah peserta 387 orang dan terealisasi 100%. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 71.176.000,- terealisasi sebesar Rp. 59.836.000,- atau 84,07%, dana tersisa Rp. 11.340.000,- adalah Sisa dana dari anggaran sosialisasi

pendidikan gratis yang tidak dilaksanakan.

5. Penyusunan Rencana Perda Penyelenggaraan Pendidikan

Kegiatan Penyusunan Rencana Perda Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan yang dilaksanakan mengingat bahwa peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan sudah tidak sesuai lagi dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan pembagian urusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali kegiatan dengan hasil 1 Dokumen dan terealisasi 100%. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 41.976.000,- atau 69,95%, dana tersisa Rp. 18.024.000,- adalah Sisa dana dari anggaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah tidak dilaksanakan karena tidak ada pendampingan anggota DPRD kab. Sinjai di kota Bandung.

h. Bantuan Operasional Sekolah

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan oleh pemerintah pada lembaga pendidikan tingkat wajardikdas 9 tahun, yaitu SD dan SLTP sebagai pengganti dana operasional yang biasa dipungut dari anak-anak didik lembaga pendidikan tersebut, sehingga dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah ini semua anak didik Setiap lembaga yang mendapatkan bantuan BOS ini dibebaskan dari iuran SPP yang biasanya dibayar setiap bulan.

Dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah ini, maka akan lebih meringankan beban para orangtua siswa dengan dihilangkannya biaya SPP bulanan. Kepala sekolah dan seluruh staf pengajar yang ada juga merasakan kemudahan yang didapat dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah karena proses yang tadinya dimulai dari mengumpulkan biaya dari tiap siswa, menjadi hanya tinggal melaksanakan dan mengelola dana yang sudah ada sesuai dengan aturan dan petunjuk penggunaan dari pemerintah mengenai dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut.

a. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personil sekolah dan membebaskan pungutan biaya operasional bagi peserta didik guna meringankan beban biaya bagi peserta didik. Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan jumlah sekolah penerima sebanyak 241 SD dan 41 SMP dan terealisasi 100%. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 32.722.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.749.941.526,- atau 90,92%, dana tersisa Rp. 18.024.000,- disebabkan karena dana disesuaikan dengan kebutuhan sisa dana tersebut tidak dicairkan.

Tabel 3.5
pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS RKPD		INDIKATOR KINERJA		2017			PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	% REALISASI			TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1	Angka Melek Huruf	100	100	100	I	Pendidikan Anak Usia Dini	979.620.400,00	817.240.400,00	83,42
		2	Angka Partisipasi Kasar PAUD	72,10	96,52	133,70	1.	Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pagar Lembaga Paud	432.500.000,00	433.870.000,00	99,86
		3	APK SD	101,45	113,98	112,35	2.	BOP PAUD (DAK)	346.800.000,00	185.400.000,00	53,46
		4	APK SMP	99,35	115,35	116,10	3.	WORKSHOP BUNDA PAUD	24.803.000,00	24.803.000,00	100,00
		5	APM SD	88,55	100	100,65	4.	Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	101.758.300,00	101.758.300,00	100,00
		6	APM SMP	79,95	100	125,08	5.	Kegiatan Pengembangan Gugus PAUD	50.711.800,00	50.711.800,00	100,00
							6.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidikan PAUD	21.047.300,00	20.697.300,00	98,34
							II	Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	9.540.980.530,00	9.423.312.350,00	98,77
							1.	Lomba Kreatifitas Siswa	17.771.600,00	13.347.100,00	75,10

							2.	Olimpiade Mipa SD	10.808.780,00	10.808.700,00	100,00
							3.	Pengembangan Gugus Tingkat SD	178.666.000,00	178.666.000,00	100,00
							4.	Pelaksanaan UASBN Tingkat SD	323.256.000,00	322.539.000,00	99,78
							5.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (DAK SD)	3.653.000.000,00	3.637.312.000,00	99,57
							6.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun (DAU SD dan SMP)	3.092.875.000,00	3.087.723.000,00	99,83
							7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAK SMP)	1.898.000.000,00	1.840.870.000,00	96,99
							8.	Workshop Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Pertama (SPM SMP)	21.563.500,00	21.563.500,00	100,00
							9.	Workshop Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SNP SMP)	24.256.500,00	24.256.500,00	100,00
							10.	Pembinaan MGMP dan MKKS Berbasis Gugus SMP	97.982.500,00	97.982.500,00	100,00
							11.	Olimpiade Sains Tingkat SMP	33.660.600,00	28.350.600,00	84,22
							12.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD	54.155.500,00	52.155.500,00	96,23

							13.	Fasilitas Festival Lomba Seni Siswa SMP	59.073.150,00	50.985.650,00	86,31
							14.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMP	75.911.400,00	56.791.400,00	74,81
							III	Program Pendidikan Menengah	22.864.900,00	22.864.900,00	100,00
							1.	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Tingkat SMP	22.864.900,00	22.864.900,00	100,00
							IV	Pendidikan Non Formal	87.979.300,00	87.979.300,00	100,00
							1.	Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Lanjutan	87.979.300,00	87.979.300,00	100,00
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal	1.	Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik	2000	1791	89,55	V	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	198.148.680,00	196.643.680,00	99,24
		2	Jumlah Siswa dan Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu	162 Siswa 300 Mahasiswa	141 Siswa 681 Mahasiswa	87,04 227,00	1.	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	82.200.500,00	82.200.500,00	100,00
		3	Angka Kululusan Peserta Didik	99,00	98,50	99,49	2.	Workshop Pembuatan Aplikasi Penilaian pembelajaran	78.649.000,00	77.144.000,00	98,09
		4	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	73,00	76,12	104,27	3.	Rekrutmen Asesor Penilaian Kinerja	37.299.180,00	37.299.180,00	100,00

3	Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik yang berkarakter	1	Prosentase kedisiplinan pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik	20	0	100	VI	Manajemen Pelayanan pendidikan	546.098.300,00	545.097.350,00	99,82
				20	0	100	1.	Dewan Pendidikan	96.804.100,00	96.804.100,00	100,00
				20	0	100	2.	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	37.988.500,00	37.988.500,00	100,00
							3.	Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan	71.115.800,00	71.114.850,00	100,00
							4.	Penyusunan Profil Pendidikan	111.523.500,00	111.523.500,00	100,00
							5.	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Berprestasi	32.389.500,00	32.389.500,00	100,00
							6.	Penertiban Anak Sekolah dan Tenaga Pendidik pada Jam Sekolah	115.059.800,00	115.059.800,00	100,00
							7.	Manajemen Pelaporan dan Pengelolaan BOS Tingkat SD	81.217.100,00	80.217.100,00	98,77
							VII	Pembebasan Biaya Pendidikan	7.423.352.000,00	7.355.253.500,00	98,81
							1.	Tabungan Siswa Berprestasi	141.846.000,00	141.658.500,00	99,87

							2.	Pemberian Penghargaan Kepada Mahasiswa Berprestasi	2.176.245.000,00	2.131.628.000,00	97,95
							3.	Pendidikan Gratis (Kesra)	4.497.085.000,00	4.960.155.000,00	99,72
							4.	Sosialisasi Juknis Advokasi berbagai Peraturan Pemerintahan dibidang Pendidikan	71.176.000,00	59.836.000,00	84,07
							5.	Penyusunan Rencana Perda Penyelenggaraan Pendidikan	60.000.000,00	41.976.000,00	69,96
							VIII	Bantuan Operasional Sekolah	32.722.800.000,00	29.749.941.526,00	90,92
							1.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah	32.722.800.000,00	29.749.941.526,00	90,92
								JUMLAH	54.035.772.634,70	52.204.685.862,00	96,61

Analisis Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk Program yang pencapaian kinerjanya mencapai 100%. Terlihat bahwa dari 8 Program Wajib dengan 30 kegiatan telah mencapai kinerja 100% dengan realisasi anggaran sebesar 96,37%, kegiatan yang menunjukkan pencapaian 100%.

Program dan kegiatan yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS RKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD/RPJMD	% CAPAIAN KINERJA (100%)	PROGRAM/KEGIATAN		% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
			I	Pendidikan Anak Usia Dini	83,42	16,58
			1.	Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pagar Lembaga PAUD	99,86	0,14
			2.	BOP PAUD (DAK)	53,46	46,54
			3.	WORKSHOP BUNDA PAUD	100,00	0
			4.	Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	100,00	0
			5.	Kegiatan Pengembangan Gugus PAUD	100,00	0
			6.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidikan PAUD	98,34	1,66
			II	Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	98,77	1,23
			1.	Lomba Kreatifitas Siswa	75,10	24,90
			2.	Olimpiade Mipa SD	100,00	0
			3.	Pengembangan Gugus Tingkat SD	100,00	0

			4.	Pelaksanaan UASBN Tingkat SD	99,78	0,22
			5.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (DAK SD)	99,57	0,43
			6.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun (DAU SD dan SMP)	99,83	0,17
			7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAK SMP)	96,99	3,01
			8.	Workshop Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Pertama (SPM SMP)	100,00	0
			9.	Workshop Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SNP SMP)	100,00	0
			10.	Pembinaan MGMP dan MKKS Berbasis Gugus SMP	100,00	0
			11.	Olimpiade Sains Tingkat SMP	84,22	15,78
			12.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD	96,23	3,77
			13.	Fasilitas Festival Lomba Seni Siswa SMP	86,31	13,69
			14.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMP	74,81	25,10
			III	Program Pendidikan Menengah	100,00	0
			1.	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Tingkat SMP	100,00	0
			IV	Pendidikan Non Formal	100,00	0
			1.	Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Lanjutan	100,00	0
			V	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	99,24	0,76
			1.	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	100,00	0
			2.	Workshop Pembuatan Aplikasi Penilaian pembelajaran	98,09	1,91

			3.	Rekrutmen Asesor Penilaian Kinerja	100,00	0
			VI	Manajemen Pelayanan pendidikan	99,82	0,18
			1.	Dewan Pendidikan	100,00	0
			2.	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	100,00	0
			3.	Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan	100,00	0
			4.	Penyusunan Profil Pendidikan	100,00	0
			5.	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Berprestasi	100,00	0
			6.	Penertiban Anak Sekolah dan Tenaga Pendidik pada Jam Sekolah	100,00	0
			7.	Manajemen Pelaporan dan Pengelolaan BOS Tingkat SD	98,77	1,23
			VII	Pembebasan Biaya Pendidikan	98,81	1,19
			1.	Tabungan Siswa Berprestasi	99,87	0,13
			2.	Pemberian Penghargaan Kepada Mahasiswa Berprestasi	97,95	2,05
			3.	Pendidikan Gratis (Kesra)	99,72	0,28
			4.	Sosialisasi Juknis Advokasi berbagai Peraturan Pemerintahan dibidang Pendidikan	84,07	15,93
			5.	Penyusunan Rencana Perda Penyelenggaraan Pendidikan	69,96	30,04
			VIII	Bantuan Operasional Sekolah	90,92	9,08
			1.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah	90,92	9,08
				JUMLAH	96,61	3,39

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai pada Tahun Anggaran 2017 merupakan tahun keempat dari Rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Dari hasil laporan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa dari analisis tiga sasaran, terdapat dua belas Indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2017, sembilan indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 75% dari total indikator. Sementara itu, sebanyak tiga indikator atau sebesar 25% belum memenuhi target. Indikator yang belum mencapai target realisasi adalah indikator Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik, Jumlah Siswa yang Mendapatkan Bantuan dana pendidikan berdasarkan Syarat Tertentu, Angka Kelulusan Peserta Didik. Tidak tercapainya target dipengaruhi oleh belum terpenuhinya kualifikasi pendidikan berdasarkan syarat yang ditetapkan sehingga tenaga pendidik belum bisa melaksanakan sertifikasi, adanya peralihan wewenang sehingga Sekolah Menengah Atas dan Sederajat beralih ke provinsi, Adanya Siswa yang terdaftar namun tidak mengikuti ujian.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Walau semua indikator telah mencapai hasil yang diharapkan namun terjadi ketidakselarasan antara data Angka Melek Huruf pada Dinas Pendidikan dan BPS yang mana untuk versi Dinas Pendidikan Penuntasan Program untuk meningkatkan Angka Melek Huruf telah tuntas 100% sementara data BPS masih tersisa sebanyak 6.172 orang. Solusi dari ketidakcapaian ini adalah akan diadakan penelusuran ulang / pendataan ulang by name by address untuk pencocokan data.

Adanya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat menjadi kewenangan provinsi. Solusi dari hal ini adalah diadakan perbaikan nilai indikator berdasarkan kewenangan daerah.

Masih rendahnya kualitas dan mutu pendidik, belum maksimalnya penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran sehingga kurang menarik minat siswa untuk belajar secara mandiri dan menemukan solusi dan pemecahan soal-soal pelajaran sehingga mereka hanya mengacu pada soal-soal tahun sebelumnya yang tentunya sudah

kadaluarsa sehingga mempengaruhi rendahnya nilai kelulusan. Solusi untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan adalah dengan sosialisasi pengelolaan sarana dan prasarana, penyempurnaan kurikulum melalui KKG, KKS dan Pelatihan, Diklat dan Bimtek, panduan pengembangan diri, peningkatan prestasi akademik dan non akademik melalui kegiatan Kurikuler dan Ekstrakurikuler, peningkatan kesejahteraan guru, dan pemerataan guru.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
2. Penuntasan Buta Aksara
3. Angka Partisipasi Murni (APM)
4. Data Siswa Berprestasi
5. Data Mahasiswa Berprestasi
6. Data Guru yang telah bersertifikasi
7. Data Kondisi Ruang Kelas